

**PEMBERDAYAAN KOMUNITAS DIFABEL PADA PRODUKSI BATIK CIPRAT DI
SHELTERED WORKSHOP PEDULI SAMBUNG ROSO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2026****Revi Tria Silviana^{1(a)}, Harianto^{2(b)}, Bambang Martin Baru^{3(c)}**^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Merdeka Madiun^{a)}revitria03@gmail.com, ^{b)}harianto@unmer-madiun.ac.id, ^{c)}bambangmartinbaru@unmer-madiun.ac.id**INFORMASI
ARTIKEL****Article History:**

Dikirim:

18-05-2026

Diterbitkan Online:

30-09-2026

Kata Kunci:Pemberdayaan Masyarakat,
Difabel, Batik Ciprat,
Ekonomi Kreatif, Komunitas**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemberdayaan komunitas difabel pada produksi batik ciprat di *Sheltered Workshop* Peduli (SWP) Sambung Roso, Desa Simbatan, Kabupaten Magetan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ife (1995) yang mencakup empat dimensi pemberdayaan, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan dukungan. Sebagai pelengkap, penelitian ini juga menganalisis lima kekuatan pemberdayaan menurut Ife pilihan pribadi, penentuan kebutuhan sendiri, kebebasan berekspresi, kelembagaan, dan sumber daya ekonomi untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat secara lebih rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan komunitas difabel telah berjalan cukup baik namun belum optimal. Akses dan dukungan berjalan cukup baik, ditandai dengan tersedianya fasilitas produksi yang memadai, adanya pelatihan keterampilan, serta mendapat dukungan dari pemerintah, pendamping, hingga masyarakat luas. Pemberdayaan ditinjau belum optimal karena partisipasi dan kontrol difabel masih rendah. Kehadiran dan keterlibatan difabel dalam kegiatan produksi belum konsisten dan merata. Difabel belum aktif dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan usaha masih didominasi oleh pendamping. Selain itu, persaingan usaha dan ketergantungan pada penjualan batik juga menjadi hambatan dalam proses pemberdayaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa anggota komunitas difabel memiliki potensi sebagai aktor kreatif dan mandiri dalam pembangunan sosial dan pelestarian budaya lokal.

Keywords:Community Empowerment,
Persons with Disabilities,
Splash Batik, Creative
Economy, Community**Corresponding Author:**

revitria03@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the empowerment of a disability community in the production of batik ciprat (splash batik) at *Sheltered Workshop Peduli (SWP) Sambung Roso, Simbatan Village, Magetan Regency*. The research employs a qualitative method with a descriptive approach through observation, interviews, and documentation. The study is grounded in Jim Ife's (1995) community empowerment theory, which encompasses four dimensions of empowerment: access, participation, control, and support. As a complement, this study also analyzes Ife's five powers of empowerment personal choice, self-determination of needs, freedom of expression, institutional strength, and economic resources to identify supporting and hindering factors in greater detail. The results indicate that the empowerment of the disability community has proceeded fairly well, though not yet optimally. Access and support have progressed reasonably well, marked by adequate production facilities, skills training, and support from the government, facilitators, and the wider community. Empowerment is considered not yet optimal because participation and control among persons with disabilities remain low. Their

attendance and involvement in production activities are inconsistent and uneven. Persons with disabilities are not yet actively involved in decision-making, and business management remains dominated by facilitators. In addition, business competition and dependence on batik sales pose further obstacles to the empowerment process. This study shows that members of the disability community hold potential as creative and independent actors in social development and the preservation of local culture.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v8i3.1596>

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi pembangunan sosial yang berorientasi pada peningkatan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks pembangunan inklusif, pemberdayaan tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pada umumnya, tetapi juga bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas (difabel). Difabel memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi, namun dalam realitasnya masih sering dihadapkan pada keterbatasan.

Pendekatan komunitas (*Community Development*) adalah kegiatan pengembangan masyarakat secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Lubis, 2021). Hal ini juga menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Magetan, yang mulai mengembangkan program pemberdayaan difabel melalui kegiatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal sebagai sarana meningkatkan kemandirian dan partisipasi sosial mereka.

Keberadaan pemberdayaan komunitas difabel Kabupaten Magetan terdapat di Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi merupakan contoh nyata praktik pemberdayaan sosial bagi komunitas difabel pada produksi batik ciprat. Melalui wadah *Sheltered Workshop* Peduli Sambung Roso, para penyandang disabilitas yang semula dianggap tidak produktif kini mampu berperan sebagai pelaku aktif dalam kegiatan ekonomi kreatif. Komunitas ini berhasil mengubah posisi difabel dari objek penerima bantuan menjadi subjek yang kreatif dan produktif melalui kegiatan ekonomi berbasis budaya lokal. Batik ciprat menjadi media ekspresi sekaligus sumber

ekonomi, sehingga para difabel mampu menunjukkan kemandirian, kemampuan bekerja sama, serta kontribusi dalam pelestarian seni tradisional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), penyandang disabilitas di Indonesia tercatat lebih dari 17,8 juta jiwa, yang mana sepertiga dari jumlah tersebut belum menamatkan pendidikan dasar, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia hanya sebesar 23,94 persen (BPS, 2024).

Sari dan Megasari (2021) dengan studinya di Desa Soso Gandusari Blitar, mengungkapkan bahwa kaum difabel dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya, atau bahkan merepotkan orang lain, sebuah pandangan yang mendominasi persepsi publik. Anggapan negatif ini memunculkan penilaian yang merugikan, menyebabkan sebagian difabel merasa minder, kurang percaya diri, dan sulit terlibat penuh dalam interaksi sosial.

Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah menegaskan komitmen untuk melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas menjadi krusial untuk memastikan mereka dapat bersaing secara efektif dan aktif dalam aktivitas ekonomi global (Marini et al., 2024). Dengan adanya payung hukum yang kuat, setiap kelompok difabel seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi secara mandiri kepada masyarakat.

Tantangan struktural yang dihadapi penyandang difabel seperti keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan serta rendahnya partisipasi dalam dunia kerja, sedangkan tantangan kultural misalnya stigma masyarakat dan norma sosial yang membatasi peran difabel.

Disabilitas seringkali dipandang sebagai hambatan utama untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi, yang berujung pada marginalisasi dan kemiskinan.

Menanggapi tantangan struktural dan kultural ini, tren pemberdayaan ekonomi kreatif bagi difabel terus dikembangkan di berbagai wilayah, dengan fokus pada kerajinan tangan, khususnya batik. Batik dipilih sebagai media karena sifatnya yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan beragam jenis keterbatasan. Pelestarian batik kini tidak hanya sebagai seni tradisional, tetapi juga sebagai sektor ekonomi kreatif yang menjembatani warisan budaya dengan peluang kewirausahaan, sehingga menjadi media inklusi sosial yang penting di masyarakat luas termasuk bagi komunitas difabel.

Studi-studi pemberdayaan difabel melalui batik terdahulu menunjukkan beberapa keterbatasan yang menciptakan celah penelitian. Penelitian dari Ichwan dan Pradana (2022) terkait difabel di Desa Gebyog, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan hanya sebatas mendeskripsikan proses rehabilitasi sosial melalui *Sheltered Workshop* Peduli (SWP) Baskara yang merupakan program eksogen (dari luar) yang didanai pemerintah. Sementara itu, penelitian oleh Zachari et al. (2024) menekankan strategi dan pendampingan bagi penyandang disabilitas tuli untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian finansial.

Dua studi tersebut belum mengulas pemberdayaan komunitas difabel itu sendiri dalam menjaga keberlanjutan kegiatan produksi dan relasi sosial di lingkungannya, khususnya di wilayah pedesaan. Kekurangan lain terletak pada fokus teoretis pada penelitian Susanti, Prameswari, dan Pratita (2025) yang masih didominasi oleh pendekatan program bantuan atau pendampingan yang didorong oleh pihak eksternal, seperti Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dari Universitas Katolik Widya Karya di Malang.

Hal yang membedakan dari penelitian ini ialah analisis pemberdayaan komunitas difabel pada industri batik ciprat di Kabupaten Magetan yaitu pada komunitas *Sheltered Workshop* Peduli Sambung Roso Desa Simbatan sebagai model pemberdayaan yang digerakkan oleh inisiatif komunitas mandiri. Penelitian ini meninjau kembali paradigma pemberdayaan, dengan menegaskan peran komunitas difabel

sebagai subjek kreatif dan aktor mandiri dalam pembangunan sosial dan ekonomi kreatif.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: (1) bagaimana proses pemberdayaan komunitas difabel berlangsung pada produksi batik ciprat di *Sheltered Workshop* Peduli (SWP) Sambung Roso, Desa Simbatan, Kabupaten Magetan, ditinjau dari dimensi akses, partisipasi, kontrol, dan dukungan; (2) bagaimana model pemberdayaan yang digerakkan oleh inisiatif komunitas mandiri ini berkontribusi terhadap keberlanjutan kegiatan produksi dan relasi sosial di lingkungan pedesaan; dan (3) apa saja faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan komunitas difabel tersebut, ditinjau dari lima kekuatan pemberdayaan menurut Jim Ife, yaitu pilihan pribadi, penentuan kebutuhan sendiri, kebebasan berekspresi, kelembagaan, dan sumber daya ekonomi.

Penelitian ini sangat penting, karena hingga tahun 2025 perbedaan antara teori/kebijakan dan kenyataan di lapangan masih cukup lebar, meskipun ada aturan dan beberapa praktik untuk memberdayakan para difabel terutama di wilayah pedesaan Magetan, namun penyandang disabilitas sering kali belum diakui sebagai individu yang kreatif dan mandiri. Hal ini disebabkan oleh opini publik yang memandang kaum difabel sebelah mata dan menghadapi stigma karena keterbatasan fisik atau mental, padahal para difabel sebenarnya menyimpan potensi besar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberdayaan komunitas difabel pada produksi batik ciprat di Kabupaten Magetan, khususnya bagaimana komunitas *Sheltered Workshop* Peduli Sambung Roso membangun kemandirian ekonomi dan sosial melalui kegiatan produksi berbasis budaya lokal. Diresmikannya Sentra Batik Ciprat Simbatan pada tahun 2015 oleh Bupati Magetan Sumantri Noto Adinagoro (Anang, 2022) menjadi salah satu penanda penting perkembangan komunitas ini, sehingga relevan untuk dikaji lebih lanjut sebagai bagian dari praktik pemberdayaan masyarakat difabel di wilayah pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena fokus utama dari penelitian ini bukanlah pada angka atau data statistik, melainkan pada

pemahaman yang mendalam terhadap pemberdayaan komunitas difabel pada proses produksi batik ciprat sebagai bentuk pemberdayaan sosial di Kabupaten Magetan tepatnya di Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi.

Studi penelitian ini dilaksanakan di Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan. Pemilihan lokasi ini dilakukan berdasarkan kesesuaian langsung dengan fokus penelitian, yaitu “Pemberdayaan Komunitas Difabel pada Produksi Batik Ciprat di Kabupaten Magetan”. Desa Simbatan dipilih karena di wilayah tersebut terdapat komunitas difabel yang aktif mengembangkan usaha batik ciprat sebagai bentuk pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi para anggotanya. Penelitian ini dilaksanakan selama periode Juli-Agustus tahun 2026, mencakup tahap observasi awal, pengumpulan data lapangan, hingga verifikasi temuan.

Teknik pemilihan informan atau narasumber di penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan responden secara sengaja berdasarkan kriteria khusus (Hardani et al., 2020). Informan yang dipilih adalah mereka yang dinilai memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses pemberdayaan komunitas difabel tersebut.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara semi-terstruktur secara mendalam kepada informan yang dipilih, serta dokumentasi yang foto atau file lain sebagai bukti berkaitan dengan pemberdayaan komunitas difabel *Sheltered Workshop* Peduli Sambung Roso pada produksi Batik Ciprat Langitan.

Penelitian ini memanfaatkan 2 jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui interview atau wawancara dan observasi langsung di Desa Simbatan dengan informan yang dipilih. Sementara data sekunder diperoleh dari dokumen kelembagaan, studi-studi terdahulu, termasuk buku, jurnal, artikel, situs web di internet, dan sumber sejenis lainnya yang relevan dengan objek yang diteliti.

Guna menjamin keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pengelola *Sheltered Workshop* Peduli Sambung Roso, anggota komunitas difabel, dan pihak

terkait lainnya, untuk melihat kesesuaian dan konsistensi data. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, guna memastikan bahwa temuan tidak hanya bergantung pada satu metode pengumpulan data. Selain itu, triangulasi waktu juga diterapkan dengan melakukan pengecekan data pada waktu dan situasi yang berbeda untuk melihat konsistensi jawaban informan.

Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Proses analisis ini melalui beberapa tahap. Tahapan pertama dalam analisis adalah pengumpulan data, reduksi data, setelah itu dilakukan penyajian data dalam bentuk narasi tematik, matriks, atau tabel kategorisasi untuk memudahkan peneliti dalam melihat hubungan antartema atau pola tertentu yang muncul dari data lapangan. Tahapan berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi makna berdasarkan pola-pola yang ditemukan. Tahapan terakhir yakni ditarik suatu kesimpulan yang bersifat sementara dan akan terus diverifikasi sepanjang proses pengumpulan data untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan.

Mengingat informan dalam penelitian ini merupakan bagian dari kelompok rentan (penyandang disabilitas), penelitian ini memperhatikan prinsip etika penelitian secara ketat. Sebelum proses wawancara dan observasi dilakukan, peneliti terlebih dahulu menjelaskan tujuan, prosedur, serta hak informan kepada seluruh partisipan, dan memperoleh persetujuan (*informed consent*) secara lisan maupun tertulis dari masing-masing informan atau pendamping/wali yang berwenang, khususnya bagi informan dengan keterbatasan komunikasi atau kognitif. Untuk melindungi privasi dan kenyamanan informan, nama-nama yang dicantumkan dalam hasil dan pembahasan penelitian ini menggunakan inisial atau nama samaran, kecuali terdapat pernyataan tertulis dari informan yang bersangkutan (atau pihak yang berwenang mewakilinya) yang mengizinkan pencantuman nama asli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Simbatan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, berjarak sekitar 7-8 km ke arah

timur dari pusat kota. Secara geografis, desa ini berada di dataran rendah dengan topografi yang landai, berada pada ketinggian 80-120 meter di atas permukaan laut (mdpl). Desa ini dikenal sebagai desa wisata budaya dengan adanya situs Petirtaan Dewi Sri dan Batik Ciprat Langitan yang diproduksi oleh kelompok difabel.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magetan dalam publikasi Kecamatan Nguntoronadi Dalam Angka 2025, jumlah penduduk Desa Simbatan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 3.407 jiwa. Komposisi penduduk tersebut terdiri dari 1.660 jiwa laki-laki dan 1.747 jiwa perempuan. Besarnya jumlah penduduk ini juga memberikan pengaruh terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat desa, terutama dalam penyediaan tenaga kerja produktif serta pengembangan sektor pertanian dan usaha mikro.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Simbatan secara umum masih didominasi oleh sektor agraris, terutama pertanian. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis desa yang memiliki tanah subur serta ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas. Sebagian besar masyarakat Desa Simbatan bekerja sebagai petani, buruh tani, pedagang kecil, pelaku usaha mikro. Selain sektor pertanian, Desa Simbatan juga memiliki potensi di bidang pariwisata budaya, terutama dengan adanya situs sejarah seperti Patirtaan Dewi Sri Simbatan, yang menjadi daya tarik wisata lokal. Dari sisi sosial, masyarakat Desa Simbatan masih menjunjung tinggi nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan tradisi budaya lokal.

Sheltered Workshop Peduli (SWP) Sambung Roso merupakan sebuah lembaga yang berstatus sebagai kelompok swadaya masyarakat, yakni sekumpulan individu yang menyatukan diri secara sukarela atas dasar kesamaan kepentingan dan kebutuhan untuk meningkatkan taraf hidup, sosial, dan ekonomi anggotanya. Organisasi ini bergerak dalam bidang pemberdayaan sosial, khususnya bagi penyandang disabilitas di Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan. SWP Sambung Roso berdiri pada tanggal 17 Maret 2015.



Gambar 1. Lokasi SWP Sambung Roso

Sumber: Penulis, 2026

SWP Sambung Roso bertujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar mampu mencapai kemandirian sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas. Pada pelaksanaannya, SWP Sambung Roso menjalankan berbagai kegiatan pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan produksi, pendampingan sosial, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pembinaan mental dan sosial.

Informan yang diwawancarai penelitian ini terdiri dari 2 pendamping komunitas (1 ketua dan 1 pelatih), 3 anggota komunitas difabel, serta Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Usia informan berkisar antara 25–50 tahun, dengan pengalaman pemberdayaan komunitas difabel dan produksi batik ciprat yang bervariasi: pendamping aktif dalam pelatihan keterampilan, anggota difabel terlibat langsung dalam proses produksi batik ciprat, sedangkan pejabat dinas mendukung program rehabilitasi sosial berbasis ekonomi kreatif.

Tabel 1. Kategori Informan Penelitian Beserta Jumlahnya

No.	Informan	Jumlah
1.	Ketua <i>Sheltered Workshop</i> Peduli (SWP) Sambung Roso (Bu Maryani)	1 orang
2.	Anggota Komunitas Difabel <i>Sheltered Workshop</i> Peduli (SWP) Sambung Roso (Irfan Herianto, Meiliya Wulandari, Sunardi)	3 orang

3.	Pendamping/Pelatih Komunitas Difabel <i>Sheltered Workshop</i> Peduli (SWP) Sambung Roso (Bu Deny Mustika Kusuma Wardhani)	1 orang
4.	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan (Pak Sutrisno)	1 orang
Total		6 orang

Sumber: Penulis, 2026

Hasil dari penelitian ini dipaparkan dan dideskripsikan berdasarkan teori pemberdayaan Jim Ite (1995) yang meliputi 4 indikator yaitu, akses, partisipasi, kontrol, dan dukungan. Temuan penelitian ini juga diposisikan untuk mengisi celah yang belum terjawab oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian Ichwan dan Pradana (2022) di SWP Baskara, Desa Gebyog, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, terbatas pada deskripsi proses rehabilitasi sosial melalui program eksogen yang didanai pemerintah, tanpa mengulas bagaimana komunitas itu sendiri menjaga keberlanjutan produksi dan relasi sosialnya. Zachari et al. (2024) menyoroti strategi pendampingan disabilitas tuli untuk kemandirian finansial, namun tidak menyentuh dinamika internal komunitas produksi berbasis kerajinan di wilayah pedesaan. Sementara itu, Susanti, Prameswari, dan Pratita (2025) masih berfokus pada pendekatan program bantuan eksternal (PKM Universitas Katolik Widya Karya, Malang) sebagai penggerak utama pemberdayaan. Berbeda dari ketiganya, penelitian ini menempatkan komunitas difabel SWP Sambung Roso sebagai unit analisis utama untuk melihat bagaimana akses, partisipasi, kontrol, dan dukungan berjalan *dari dalam* komunitas itu sendiri, sekaligus bagaimana keberlanjutan produksi batik ciprat dan relasi sosial di lingkungan pedesaan dijaga tanpa sepenuhnya bergantung pada program eksogen.

Akses

Indikator pertama yakni akses, menjadi indikator penting dalam pemberdayaan karena menentukan peluang difabel untuk berkembang secara mandiri. Dalam konteks pemberdayaan komunitas, akses juga mencerminkan adanya dukungan struktural dan kelembagaan dari berbagai pihak. Informasi yang digali

mencakup akses terhadap layanan dasar, bantuan modal, serta peluang pemasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat diketahui bahwa akses terhadap fasilitas dasar di SWP Sambung Roso telah terpenuhi dengan cukup baik. Komunitas menyediakan konsumsi harian, sarana kebersihan, serta layanan pemeriksaan kesehatan rutin melalui kerja sama dengan pihak Puskesmas.

“... Di sini kebutuhan teman-teman difabel selalu diupayakan untuk terpenuhi. Kami menyediakan konsumsi, menjaga kebersihan lingkungan kerja, dan bekerja sama dengan puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan begitu, mereka bisa bekerja dengan lebih nyaman”. Wawancara dengan Bu Maryani, Ketua SWP Sambung Roso, 2026).

Fasilitas tersebut membantu anggota difabel menjalankan aktivitas produksi dengan kondisi yang lebih stabil dan nyaman. Selain itu, lingkungan kerja yang disediakan juga relatif memadai mendukung kebutuhan anggota.



Gambar 2. Fasilitas di SWP Sambung Roso

Sumber: Penulis, 2026

Akses terhadap peningkatan kapasitas juga cukup terbuka yang terlihat melalui berbagai pelatihan yang difasilitasi oleh dinas terkait. Anggota difabel memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keterampilan membuat batik serta memproduksi variasi produk turunan.

“... Saya senang bisa mengikuti pelatihan membuat batik. Awalnya saya belum bisa membuat batik ciprat, tetapi setelah mengikuti pelatihan saya jadi lebih paham cara mencampur warna dan membuat motif”. (Wawancara dengan Irpan Herianto, Anggota SWP Sambung Roso, 2026).

Bantuan berupa peralatan produksi dan modal usaha turut memperkuat keberlangsungan kegiatan ekonomi komunitas. Kebijakan pemerintah daerah yang mendorong penggunaan batik ciprat sebagai identitas lokal juga memperluas akses pasar. Dalam perspektif teori pemberdayaan Jim Ife (2002), akses merupakan kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan guna meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunitas difabel telah memperoleh akses terhadap sumber daya fisik, sosial, dan ekonomi yang mendukung kegiatan produksi batik ciprat. Dengan demikian, dimensi akses telah terpenuhi dengan baik.

Partisipasi

Indikator kedua yaitu partisipasi, digunakan untuk melihat sejauh mana anggota komunitas difabel SWP Sambung Roso terlibat aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan yang berlangsung. Melalui partisipasi, difabel tidak hanya menjadi objek program, tetapi juga menjadi subjek yang berperan dalam kegiatan produksi dan pengembangan usaha. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa program pemberdayaan berjalan secara inklusif dan memberikan ruang bagi difabel untuk berkontribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan mengenai dimensi partisipasi dalam pemberdayaan komunitas difabel di SWP Sambung Roso, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi anggota difabel tergolong cukup rendah. Setiap anggota difabel pada dasarnya telah memiliki pembagian tugas (tupoksi) masing-masing sesuai kemampuan yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas telah mampu membangun sistem kerja yang melibatkan difabel sebagai pelaku utama produksi.



Gambar 3. Variasi tingkat kehadiran dan keterlibatan anggota difabel dalam kegiatan produksi

Sumber: Penulis, 2026

“... Tingkat kehadiran setiap anggota memang berbeda-beda. Ada yang selalu aktif, tetapi ada juga yang terkadang tidak bisa hadir karena kondisi keluarga, kesehatan, atau faktor psikologis”. (Wawancara dengan Bu Deny Mustika Kusuma Wardhani, Pendamping SWP Sambung Roso, 2026).

Tingkat partisipasi belum merata di antara seluruh anggota komunitas. Masih terdapat anggota difabel yang kurang aktif, baik dalam kehadiran maupun kontribusi kerja. Faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain latar belakang keluarga, kurangnya pembiasaan, lingkungan sosial, serta kondisi psikologis difabel. Pada kegiatan pelatihan partisipasinya cukup baik, namun dalam promosi, pemasaran, dan pengambilan keputusan, difabel belum dilibatkan secara penuh karena masih didominasi oleh pengurus.

Temuan ini memperlihatkan kontras dengan penelitian Ichwan dan Pradana (2022) di SWP Baskara, yang mendeskripsikan pelaksanaan program rehabilitasi sosial sebagai proses yang relatif linear dari sisi kelembagaan tanpa membedakan variasi keterlibatan aktual anggota di lapangan. Di SWP Sambung Roso, partisipasi yang tidak merata justru menunjukkan bahwa keberadaan struktur program eksogen (pelatihan, bantuan pemerintah) tidak otomatis diterjemahkan menjadi keterlibatan aktif tiap individu sebuah dimensi yang luput dari sorotan penelitian terdahulu tersebut.

Kondisi ini sesuai dengan konsep Jim Ife yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan komunitas. Karena Menurut Jim Ife (2016), partisipasi yang ideal adalah keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pemberdayaan, bukan hanya pada pelaksanaan. Dengan demikian, partisipasi difabel di SWP Sambung Roso masih berada pada tahap partisipasi terbatas.

Kontrol

Indikator ketiga yaitu kontrol, digunakan untuk melihat sejauh mana anggota komunitas difabel SWP Sambung Roso memiliki kemampuan dalam mengendalikan kegiatan produksi batik ciprat dan proses pemberdayaan yang berlangsung. Kontrol menjadi indikator penting dalam pemberdayaan karena berkaitan dengan kemampuan difabel dalam mengambil keputusan dan mengatur aktivitas yang mereka

jalankan. Kontrol juga menunjukkan adanya kepercayaan yang diberikan oleh pendamping dan pengurus kepada anggota difabel dalam menjalankan tugasnya.

Hasil wawancara dan observasi lapangan mengenai indikator atau dimensi kontrol dalam pemberdayaan komunitas difabel SWP Sambung Roso menunjukkan bahwa kendali utama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan produksi masih didominasi oleh pendamping. Hal ini terlihat dari proses pembagian tugas, perencanaan kegiatan, hingga manajemen usaha yang sebagian besar ditentukan oleh pendamping. Keterbatasan difabel dalam aspek keuangan, distribusi, dan manajemen usaha menunjukkan bahwa kontrol difabel terhadap sumber daya masih rendah.



Gambar 4. Pendamping mendampingi memberi arahan kepada difabel
Sumber: Arsip SWP Sambung Roso

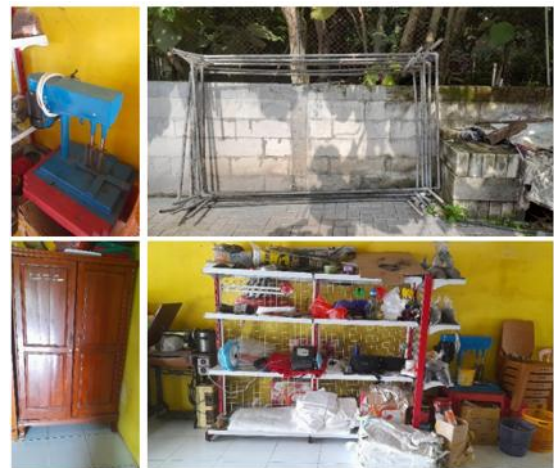
“... Untuk pembagian tugas, kami masih melakukan pendampingan karena kemampuan setiap anggota berbeda. Namun, kami tetap berusaha memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar mengambil tanggung jawab”. (Wawancara dengan Bu Deny Mustika Kusuma Wardhani, Pendamping SWP Sambung Roso, 2026).

Di sisi lain, dimensi kontrol juga memperlihatkan adanya upaya pemberian ruang kepada difabel untuk berkembang melalui kesempatan mengambil peran saat pendamping tidak berada di tempat. Faktor pendukung tumbuhnya kontrol difabel meliputi lingkungan kerja yang nyaman di shelter, dukungan keluarga yang kondusif, serta motivasi dari ketua komunitas yang aktif mengikutsertakan difabel dalam berbagai event dan bazar. Sebaliknya, faktor penghambat utama adalah rendahnya kepercayaan dan pemahaman masyarakat sekitar terhadap potensi difabel, serta adanya lingkungan keluarga yang kurang kondusif dan cenderung memanfaatkan kelemahan difabel.

Dalam perspektif Jim Ife, proses pemberdayaan memang tidak bersifat instan, melainkan melalui tahapan yang berkelanjutan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kontrol masih berada pada pihak pendamping, sehingga difabel belum memiliki kewenangan dalam menjalankan arah kegiatan pemberdayaan.

Dukungan

Indikator keempat yakni dukungan. Dimensi dukungan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana komunitas difabel SWP Sambung Roso memperoleh bantuan dan dorongan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan pemberdayaan produksi batik ciprat. Dukungan menjadi indikator penting dalam pemberdayaan karena menentukan keberlanjutan program dan motivasi anggota difabel dalam menjalankan kegiatan. Dukungan dapat berasal dari pemerintah, pendamping, keluarga, masyarakat, maupun lembaga lainnya yang terlibat dalam kegiatan komunitas.



Gambar 5. Bantuan yang Diterima SWP Sambung Roso dari Berbagai Pihak
Sumber : Arsip SWP Sambung Roso

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa dukungan terhadap komunitas difabel SWP Sambung Roso berasal dari berbagai pihak yang saling bersinergi, mulai dari pemerintah daerah, pendamping, hingga masyarakat luas. Dinas Sosial Kabupaten Magetan memiliki peran yang cukup signifikan dengan memberikan bantuan berupa pelatihan, pendampingan teknis, serta fasilitas produksi batik ciprat, sehingga anggota difabel dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka secara bertahap.

“... Dinas Sosial terus berupaya memberikan dukungan melalui pelatihan, pendampingan, serta bantuan fasilitas produksi. Harapannya, penyandang disabilitas dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi”. (Wawancara dengan Sutrisno, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan, 2026).

Di samping itu, pendamping dan pengurus komunitas juga turut berperan aktif dalam memberikan bimbingan teknis sekaligus dukungan moral kepada para anggota difabel agar mereka senantiasa merasa percaya diri, termotivasi, dan mampu mandiri dalam menjalankan kegiatan produksi.

Selain dukungan dari pemerintah dan pendamping, perhatian dari masyarakat dan berbagai lembaga eksternal juga memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan komunitas difabel SWP Sambung Roso. Berbagai lembaga turut memberikan bantuan fasilitas dan pelatihan tambahan guna memperkuat kapasitas produksi komunitas. Kegiatan pameran dan promosi produk yang diselenggarakan secara berkala juga menjadi salah satu upaya nyata dalam memperluas jangkauan pemasaran hasil karya difabel kepada khalayak yang lebih luas.

Pola dukungan eksternal ini sejalan dengan temuan Zachari et al. (2024) dan Susanti, Prameswari, dan Pratita (2025) yang juga menekankan peran krusial pihak eksternal (dinas, lembaga pendidikan, program kemitraan) dalam pemberdayaan disabilitas. Namun, berbeda dari kedua penelitian tersebut yang memposisikan dukungan eksternal sebagai penggerak utama, temuan di SWP Sambung Roso menunjukkan bahwa dukungan eksternal justru berfungsi sebagai penopang (bukan penggerak tunggal) dari inisiatif yang sudah lebih dulu tumbuh dari internal komunitas, khususnya pada dimensi kebebasan berekspresi dan kekuatan kelembagaan yang dibahas berikut ini. Hal ini menegaskan celah yang coba diisi penelitian ini: pemberdayaan yang berkelanjutan tidak semata bergantung pada besarnya dukungan eksogen, melainkan juga pada sejauh mana komunitas mampu menjaga keberlanjutannya secara internal.

Menurut Jim Ife (1995), dukungan eksternal merupakan elemen penting dalam pemberdayaan karena memungkinkan individu atau kelompok untuk mengakses jaringan,

sumber daya, dan peluang yang lebih luas. Dalam konteks ini, kuatnya dukungan yang diterima komunitas menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pemberdayaan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Penelitian ini juga melihat adanya faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan komunitas difabel SWP Sambung Roso yang dianalisis berdasarkan konsep kekuatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Jim Ife (1995). Konsep ini menekankan bahwa pemberdayaan tidak hanya dilihat dari hasil kegiatan, tetapi juga dari kekuatan yang dimiliki oleh individu dan kelompok dalam menjalankan aktivitasnya. Kekuatan tersebut meliputi kekuatan atas pilihan pribadi, kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri, kekuatan kebebasan berekspresi, kekuatan kelembagaan, dan kekuatan sumber daya ekonomi.

Pertama yakni, kekuatan atas pilihan pribadi pribadi merupakan kemampuan individu dalam menentukan pilihan terhadap aktivitas atau pekerjaan yang ingin dilakukan dalam proses pemberdayaan. Dalam konteks komunitas difabel SWP Sambung Roso, kekuatan ini berkaitan dengan kebebasan difabel dalam memilih peran dalam produksi batik ciprat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kekuatan atas pilihan pribadi menunjukkan bahwa pendamping berusaha menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik dan kemampuan masing-masing anggota difabel. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memberikan ruang bagi difabel dalam menjalankan aktivitasnya secara mandiri.

Namun, dalam praktiknya kekuatan atas pilihan pribadi masih menjadi salah satu faktor penghambat dalam pemberdayaan komunitas difabel. Pembagian tugas dalam produksi batik ciprat umumnya ditentukan oleh pendamping berdasarkan penilaian kemampuan difabel. Difabel belum sepenuhnya memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan sesuai minat dan keinginan pribadi. Kondisi ini dilakukan untuk menjaga kelancaran proses produksi dan menghindari kesalahan kerja. Meskipun demikian, keterbatasan pilihan pribadi menjadi tantangan dalam meningkatkan kemandirian difabel secara optimal.

Dalam teori Jim Ife, kekuatan atas pilihan pribadi merupakan kemampuan individu untuk menentukan pilihan hidupnya secara mandiri. Kondisi ini menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan, karena belum sepenuhnya

memberikan ruang bagi difabel dalam menentukan pilihan hidupnya.

Kedua ada kekuatan dalam menentukan kebutuhan sendiri merupakan kemampuan difabel dalam menyampaikan kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan pemberdayaan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri menunjukkan sebagai faktor penghambat pemberdayaan komunitas difabel SWP Sambung Roso. Proses identifikasi kebutuhan sudah berjalan cukup baik melalui *assessment* oleh pendamping dan pendataan kebutuhan anggota difabel yang kemudian disampaikan kepada dinas untuk ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengumpulan kebutuhan telah tersedia dan dukungan kelembagaan sudah berjalan.

Namun, pada tingkat individu difabel masih terdapat hambatan dalam menyampaikan kebutuhan secara langsung. Hambatan tersebut terlihat dari pernyataan anggota difabel yang merasa malu, sungkan, kurang percaya diri, serta keterbatasan kemampuan dalam mengungkapkan kebutuhan atau usulan.

“... Kadang saya merasa malu untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung. Biasanya saya lebih nyaman menyampaikan kepada pendamping atau meminta bantuan teman”. (Wawancara dengan Meiliya Wulandari, Anggota SWP Sambung Roso, 2026).

Kondisi ini menyebabkan difabel tidak aktif menyampaikan kebutuhan mereka kepada pendamping dan terkadang harus melalui perantara. Akibatnya, kebutuhan yang disampaikan belum sepenuhnya mencerminkan keinginan dan pilihan pribadi difabel secara langsung, sehingga kekuatan dalam menentukan kebutuhan sendiri masih belum optimal dalam proses pemberdayaan.

Menurut teori Jim Ife, kemampuan menentukan kebutuhan sendiri merupakan bagian dari proses pemberdayaan yang menekankan pada kesadaran dan kemandirian individu. Oleh karena itu, kondisi ini menjadi faktor penghambat karena difabel belum sepenuhnya menjadi subjek dalam menentukan arah pengembangan dirinya.

Ketiga, kekuatan kebebasan berekspresi berkaitan dengan kemampuan difabel dalam menyampaikan ide, kreativitas, dan gagasan dalam kegiatan produksi batik ciprat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kekuatan dalam kebebasan berekspresi menunjukkan sebagai faktor pendukung pemberdayaan komunitas difabel SWP Sambung Roso. Difabel diberikan ruang untuk mengekspresikan kreativitas dalam membuat motif batik ciprat. Pendamping memberikan kebebasan kepada difabel untuk menciptakan pola ciptaan sesuai dengan kemampuan masing-masing terutama di saat tidak ada pesanan khusus.

“... Saya senang ketika motif yang saya buat dipakai untuk produk batik. Rasanya bangga karena hasil karya saya bisa dilihat dan dihargai oleh banyak orang”. (Wawancara dengan Sunardi, Anggota SWP Sambung Roso, 2026).

Kebebasan berekspresi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kreativitas dan motivasi difabel dalam bekerja. Difabel merasa dihargai karena ide dan karya mereka diakui oleh komunitas dan masyarakat. Produk batik ciprat yang dihasilkan memiliki ciri khas yang berasal dari kreativitas anggota difabel. Pendamping hanya memberikan arahan agar hasil produksi tetap sesuai dengan standar kualitas. Dalam perspektif Jim Ife, kebebasan berekspresi merupakan bentuk kekuatan individu yang dapat mendorong proses pemberdayaan. Oleh karena itu, aspek ini menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam keberhasilan program pemberdayaan di komunitas tersebut.

Keempat, kekuatan kelembagaan berkaitan dengan keberadaan organisasi atau komunitas yang menjadi wadah bagi difabel dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan. SWP Sambung Roso berperan sebagai lembaga sosial yang memberikan ruang bagi difabel untuk mengembangkan potensi dan keterampilan. Keberadaan komunitas ini memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada difabel.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kekuatan kelembagaan menunjukkan sebagai faktor pendukung pemberdayaan komunitas difabel SWP Sambung Roso. Kekuatan kelembagaan terlihat dari relasi SWP Sambung Roso yang terjalin dengan berbagai lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan instansi lainnya yang berjalan dengan baik melalui kerja sama, pelatihan, fasilitasi program, serta pelibatan dalam berbagai kegiatan dan event. Selain itu, bantuan

berupa pelatihan, promosi produk batik ciprat, fasilitasi kegiatan, serta bantuan ekonomi seperti uang tunai dan ternak kambing memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian anggota difabel.

Namun demikian, hasil wawancara dan observasi juga menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan belum sepenuhnya optimal, terutama terkait fasilitas fisik seperti lahan parkir, atap bangunan, dan tempat penjemuran batik yang masih kurang memadai. Keterbatasan fasilitas ini menjadi catatan bahwa meskipun kekuatan kelembagaan sudah berjalan baik, masih diperlukan peningkatan dukungan sarana dan prasarana agar kegiatan produksi batik ciprat dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, kekuatan kelembagaan tetap menjadi faktor pendukung pemberdayaan, namun dukungan yang diberikan masih perlu ditingkatkan agar pemberdayaan komunitas difabel SWP Sambung Roso dapat berjalan lebih optimal.

Dalam teori Jim Ife, kekuatan kelembagaan merupakan faktor penting dalam mendukung pemberdayaan karena mampu menyediakan sistem, jaringan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Oleh karena itu, aspek ini menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan pemberdayaan komunitas difabel.

Kelima dan yang terakhir, kekuatan sumber daya ekonomi berkaitan dengan kemampuan komunitas difabel dalam memperoleh penghasilan dan mengembangkan usaha melalui produksi batik ciprat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kekuatan sumber daya ekonomi menunjukkan sebagai faktor penghambat pemberdayaan komunitas difabel SWP Sambung Roso. Sistem pembagian upah telah diatur berdasarkan kehadiran dan tingkat kontribusi kerja agar memberikan motivasi bagi difabel untuk lebih aktif. Namun, kondisi ekonomi komunitas masih bergantung pada penjualan produk batik. Skema pembagian pendapatan sebesar 70% untuk modal dan 30% untuk royalti menunjukkan adanya upaya menjaga keberlanjutan usaha, tetapi pendapatan yang diterima difabel tetap bergantung pada stabilitas produksi dan penjualan.

Skema pembagian pendapatan ini perlu dicermati lebih kritis dari sudut pandang kontrol ekonomi difabel itu sendiri. Alokasi mayoritas pendapatan (70%) untuk modal usaha memang lazim dalam usaha rintisan berbasis komunitas,

namun pola ini juga berarti bahwa porsi yang benar-benar dikuasai dan dapat dikendalikan langsung oleh anggota difabel sebagai insentif atas tenaga dan kreativitas yang mereka curahkan relatif kecil. Jika dikaitkan dengan indikator kontrol dalam kerangka Jim Ife, kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan keberlanjutan kelembagaan (*institutional sustainability*) dan kepentingan kemandirian ekonomi individu difabel (*individual economic agency*). Selama keputusan atas skema ini ditentukan oleh pendamping/pengurus tanpa melibatkan difabel secara langsung sebagaimana juga ditemukan pada dimensi kontrol maka skema 70%-30% berpotensi mereproduksi ketergantungan struktural yang justru hendak diatasi oleh program pemberdayaan itu sendiri. Dengan kata lain, keberhasilan kelembagaan dalam menjaga keberlangsungan usaha tidak serta-merta setara dengan tercapainya pemberdayaan ekonomi individu, karena keduanya diukur dari kepentingan yang berbeda: yang pertama dari sisi organisasi, yang kedua dari sisi penerima manfaat.

Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan sumber daya ekonomi belum sepenuhnya mampu menjamin kesejahteraan anggota difabel secara konsisten. Selain itu, terdapat berbagai kendala ekonomi yang mempengaruhi pemberdayaan, seperti persaingan dengan pembatik lain di Kabupaten Magetan yang berdampak pada penurunan penjualan, keterbatasan anggaran dari pemerintah dalam mendukung program pemberdayaan, serta belum adanya difabel yang benar-benar menguasai keterampilan menjahit sebagai pengembangan usaha. Kendala teknis dalam produksi seperti cuaca yang tidak menentu dan kurangnya tanggung jawab sebagian difabel dalam bekerja juga turut mempengaruhi proses produksi batik ciprat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan sumber daya ekonomi masih menjadi faktor penghambat pemberdayaan karena keterbatasan modal, persaingan usaha, dan kendala produksi menyebabkan pendapatan difabel belum stabil dan kegiatan pemberdayaan belum berjalan secara maksimal.

Dalam perspektif Jim Ife, kekuatan sumber daya ekonomi merupakan peningkatan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa aspek ini masih menjadi

faktor penghambat karena kemandirian ekonomi difabel belum sepenuhnya tercapai.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan komunitas difabel di SWP Sambung Roso melalui produksi batik ciprat telah berjalan cukup baik meskipun belum optimal. Dimensi akses dan dukungan sudah tergolong baik, ditopang oleh fasilitas, pelatihan, dan bantuan dari pemerintah maupun lembaga terkait. Namun, dimensi partisipasi dan kontrol masih lemah keterlibatan difabel dalam pengambilan keputusan terbatas, dan pengelolaan usaha (keuangan, pemasaran, strategi) masih didominasi pendamping. Faktor pendukung utama adalah kebebasan berekspresi dalam berkarya dan kuatnya dukungan kelembagaan, sementara faktor penghambat mencakup keterbatasan pilihan kerja mandiri, kesulitan menyampaikan kebutuhan pribadi, serta ketergantungan ekonomi pada stabilitas penjualan.

Penelitian ini terbatas pada enam informan dari satu komunitas, sehingga temuannya bersifat kontekstual dan belum bisa digeneralisasi ke komunitas difabel lain. Data dikumpulkan dalam rentang waktu terbatas sehingga dinamika jangka panjang belum tertangkap, dan sebagian informasi dari difabel harus digali melalui perantara pendamping karena keterbatasan komunikasi, sehingga berpotensi menimbulkan bias interpretasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa keempat indikator Ife (akses, partisipasi, kontrol, dukungan) tidak selalu bergerak searah pada kelompok difabel akses dan dukungan bisa sudah baik, sementara partisipasi dan kontrol tertinggal. Ini mengindikasikan bahwa penerapan kerangka Ife pada difabel perlu memperhitungkan kapasitas komunikasi dan kepercayaan diri subjek sebagai prasyarat, bukan sekadar ketersediaan ruang. Skema pembagian pendapatan 70%-30% juga menunjukkan bahwa kekuatan sumber daya ekonomi perlu dibaca dari sejauh mana skema distribusinya memberi kontrol nyata, bukan hanya dari ada-tidaknya penghasilan.

Untuk memperkuat partisipasi dan kontrol difabel, disarankan: (1) mekanisme pendampingan bertahap menuju kemandirian pengelolaan usaha, dengan tahapan dan indikator kesiapan yang jelas; (2) pelatihan literasi keuangan dasar sebagai bekal sebelum pelibatan dalam pengambilan keputusan; (3)

forum komunikasi kebutuhan yang lebih inklusif untuk mengurangi ketergantungan pada perantara; dan (4) peninjauan ulang skema pembagian pendapatan secara partisipatif bersama anggota difabel.

Penelitian selanjutnya disarankan memperluas subjek ke komunitas difabel lain untuk menguji konsistensi pola temuan ini, menggunakan pendekatan longitudinal untuk mengamati perkembangan partisipasi dan kontrol dari waktu ke waktu, serta mengkaji lebih dalam kelayakan skema pembagian pendapatan pada usaha ekonomi kreatif berbasis difabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardani, H., Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Buku metode penelitian kualitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Ife, J. (1995). *Community development : Creating Community Alternatives Vision, Analysis, and Practice*. Melbourne, Australia: Longman.
- Ife, J. (2016). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice* (2nd ed.). Australia: Cambridge University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ife, J. (2002). Human Rights, Global Citizenship and Community Development. *Canadian Review of Social Policy Revue Canadienne De Politique Sociale*, (49-50). Retrieved from <https://crsp.journals.yorku.ca/index.php/crsp/article/view/33834>
- Ichwan, M. K., & Pradana, G. W. (2022). Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas intelektual melalui *Sheltered Workshop Peduli* (SWP) Baskara di Desa Gebyog oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan. *Publika*, 205–218.
- Lubis, Z. (2021). Manajemen Dakwah Pengembangan Masyarakat. *Jurnal Bina*

- Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat, 4(1), 1–11.
- Marini., Rahmadi, W., Rahmawati, A., Istiqoma., & Muchlasin, A. (2025). Pemberdayaan masyarakat di era digital. YPAD Penerbit, 1(1). <https://journal.yayasanpad.org/index.php/ypadbook/article/view/339>
- Sari, S. Y. D. R., & Megasari, R. (2021). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Community Development KSM Batik Percik. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan, 1(8), 799–805. <https://doi.org/10.17977/um066v1i82021p799-805>
- Susanti, D. I., Prameswari, S. B., & Pratita, B. W. A. (2025). Pemberdayaan komunitas batik tulis difabel Bhakti Luhur di Kota Malang. *PJAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 10(2), 23–32.
- Zachari, N. N., Dewi, R. S., Fatihah, R. P., Septiana, W., & Purwanto, D. (2024). Pemberdayaan masyarakat penyandang industri batik Toeli Laweyan di Surakarta. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 12(1), 10–18.
- Anang F, A. (2022, January 7). Karya Hebat Warga Dissabilitas | Batik Ciprat Simbatan - Tilik Desa. Tilik Desa. <https://tilikdesa.id/2022/01/07/karya-hebat-warga-dissabilitas-batik-ciprat-simbatan>.
- <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/20/43880dc0f8be5ab92199f8b9/potret-penyandang-disabilitas-di-indonesia-hasil-long-form-sp2020.html>